



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Ile Napo Telp. (0383) 21090– Fax. (0383) 21182

LARANTUKA

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMRINTAH
(LKIP)**

TAHUN 2023

LARANTUKA 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan perkenan-Nya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan penyajian suatu proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang telah dicapai selama kurun waktu satu tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Upaya ini menghasilkan suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, strategi dan program serta menyediakan ukuran/indicator keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya disampaikan ke semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu sepenuh hati dalam penyusunan Laporan Kinerja

Disadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa diharapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan LKIP di tahun mendatang.

Semoga LKIP ini bermanfaat khususnya bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dalam upaya mewujudkan *Good Governance* dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja BKAD Kabupaten Flores Timur.

Larantuka, Januari 2024

Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Flores Timur,



Verdinandus P. A. Bolen, SE
Pembina Tk.I

Nip. 197107132000121006

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Bab I : Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pembentukan OPD Badan dan Aset Daerah	2
1.3 Susunan Organisasi	4
1.4 Sumber Daya Manusia	5
1.5 Isu Strategis	8
1.6 Dasar Hukum	10
Bab II : Perencanaan Kinerja	13
2.1 Penetapan Indikator Sasaran sesuai Perjanjian Kinerja	14
2.2 Revisi Perjanjian Kinerja	14
Bab III : Akuntabilitas Kinerja	51
3.1 Pengukuran Kinerja	51
Bab IV : Penutup	84
4.1 Kesimpulan	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang bersangkutan yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai instansi pemerintah juga berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Bupati Flores Timur. Penyusunan LKIP merupakan pelaksanaan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara teknis penyusunan LKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP memberikan gambaran tentang capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam rangka pencapaian sasaran/target kinerja. Selain itu LKIP tahun 2023 juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan

sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

LKIP BKAD tahun 2023 diharapkan dapat memberi informasi yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai bahan evaluasi berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja BKAD pada penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Menginformasikan pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjinan Kinerja (PK) kepada pemberi mandat dalam hal ini adalah Bupati Flores Timur.

1.2 Pembentukan OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melakukan penataan perangkat daerah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur. Dalam Peraturan Daerah tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan.

Sebagai penyelenggara urusan penunjang keuangan, berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memfasilitasi

perumusan kebijakan dan koordinasi program unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub urusan pengelolaan keuangan dan aset dengan fungsi :

- a. Pengkoordinasian Perencanaan program dan kegiatan urusan keuangan sub urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- b. Perumusan Kebijakan Teknis urusan keuangan sub urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan sub urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan keuangan sub urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- e. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan keuangan sub urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- f. Pengelolaan administrasi badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Disamping melaksanakan tugas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah juga mempunyai tugas :

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yang mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. Melaksanakan fungsi BUD;
 - e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yang melaksanakan fungsinya selaku BUD, dengan kewenangan :
 - a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD / DPA-SKPD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. Menetapkan SPD (Surat Pencairan Dana);
 - g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. Menyajikan informasi keuangan daerah;
 - j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah

1.3 Susunan Organisasi

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 dengan susunan organisasi yang terdiri dari :

- 1. Kepala Badan;**

- 2. Sekretariat, yang membawahi :**

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
- 3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah,** yang membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah I;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah II; dan
 - 3) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah III
- 4. Bidang Perbendaharaan Daerah,** yang membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perbendaharaan Gaji;
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan Non Gaji;
 - 3) Sub Bidang Penatausahaan Pertanggungjawaban;
- 5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah,** yang membawahi:
 - 1) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Akuntansi I;
 - 2) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Akuntansi II; dan
 - 3) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Akuntansi III
- 6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah,** yang membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan;
 - 2) Sub Bidang Pengamanan; dan
 - 3) Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan

1.4 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dalam tahun 2023 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 51 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 33 orang dan tenaga honorer sebanyak 18 orang, yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (orang)
1	IV/b	1 orang
2	IV/a	4 orang
3	III/d	9 orang
4	III/c	4 orang
5	III/b	2 orang
6	III/a	5 Orang
7	XI	2 Orang
8	II/d	1 Orang
9	II/c	2 Orang
10	II/b	3 Orang
Total		33 Orang
	Tenaga Honor	18 termasuk penjaga malam dan tenaga kebersihan.

Tabel 1.2
Jumlah dan Komposisi Pegawai berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH (orang)
1	II.b	1 orang
2	III.a	1 orang
3	III.b	4 orang
4	IV.a	15 orang

Tabel 1.3

Jumlah dan Komposisi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

• **Pegawai Negeri Sipil :**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)
1	S2	1 orang
2	S1	15 orang
3	Diploma III	7 orang
4	SLTA	10 orang
TOTAL		33 orang

• **Pegawai Kontrak :**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)
1	S1	10 orang
2	SLTA	7 orang
3	SD	1 orang
TOTAL		18 orang

Tabel 1.4

Jumlah dan Komposisi Pegawai berdasarkan Sub Unit

No.	SUB UNIT	JUMLAH (orang)
1	SEKRETARIAT	15 orang
2	BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN	8 orang

3	BIDANG PERBENDAHARAAN	14 orang
4	BIDANG AKUNTANSI	6 orang
5	BIDANG ASET	8 orang
TOTAL		51 orang

1.5 Isu Strategis

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub urusan pengelolaan keuangan dan aset terdapat beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya yang melekat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Perumusan isu-isu penting tersebut memiliki maksud untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD. Adapun isu penting terkait penyelenggaraan fungsi yang melekat pada BKAD adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah:
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2020, dimana masih ditemukan penjelasan antara lain tentang pengelolaan aset daerah yaitu adanya selisih nilai aset hasil inventarisasi, aset tetap belum seluruhnya disajikan dengan informasi yang jelas dan lengkap.

Hal tersebut mengindikasikan belum terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah

sehingga data barang milik daerah kurang akurat. Selain itu pula pencatatan dan pengakuan atas Dana BOS belum sepenuhnya memadai.

3. Masih terdapat OPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran.

Langkah – langkah yang telah dilaksanakan yakni :

1. Terwujudnya tertib administrasi dalam tata kelola aset daerah dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data barang milik daerah dapat disajikan dengan akurat agar menjadi bagian dalam mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Dalam rangka meningkatkan keakuratan data barang milik daerah, strategi yang diambil adalah optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Kebijakan yang diambil adalah inventarisasi, klarifikasi dan penataan barang milik daerah. Cara yang ditempuh untuk mendukung strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan komitmen kepala OPD/Unit Kerja selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam mengelola barang daerah secara tertib administrasi sesuai aturan berlaku;
 - b. Melaksanakan klarifikasi dan inventarisasi barang milik daerah yang dipergunakan OPD/Unit Kerja sebagai tindak lanjut atas temuan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah;
 - c. Meningkatkan pemahaman pengurus barang melalui pendampingan pengurus barang dalam pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah, barang

- yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi pengguna barang OPD
2. OPD diharapkan konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang ada dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar tidak terjadi di akhir tahun anggaran.

Strategi yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan disiplin anggaran bagi seluruh OPD agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan alokasi dalam DPA/DPPA OPD;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD melalui Rapat Evaluasi tiap triwulan yang dilaksanakan bersama dengan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Flores Timur untuk mengevaluasi penyerapan atas anggaran belanja seluruh OPD.

1.6 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

- Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
 18. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 Rencana Pembangunan Daerah Kab Flores Timur Tahun 2023-2026.
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Flores Timur selaku Kepala Daerah kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan sasaran strategis maupun indikator kinerja yang disertai dengan target yang harus dicapai. Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja;
5. Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sasaran dan indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penetapan indicator Sasaran sesuai Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Target
	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah	100 %

Sasaran	Indikator	Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah	285.854.791.344,-	294.204.843.650,-

Dalam mendukung indikator sasaran tersebut maka BKD melaksanakan berbagai Program Kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN
1	Terwujudnya Ketersediaan Administrasi Perkantoran yang Memadai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen
		Jumlah Dokumen RKA SKPD dan	4 Dokumen	4 Dokumen

	dan Berkualitas	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10 Laporan	10 Laporan
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)	3 Laporan	3 Laporan
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	490 Orang/Bulan	35 Orang/Bulan
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi	2 Dokumen	2 Dokumen

		Keuangan SKPD (Dokumen)		
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	36 Laporan	36 Laporan
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2 Laporan	2 Laporan
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai(Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah Orang yang mengikuti sosialisai peraturan perundang-undangan	5 Orang	5 Orang
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/peneranga	5 Paket	5 Paket

		n Bangunan Kantor yang disediakan (paket)		
		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	2 Paket	2 Paket
		Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga (Paket)	2 Paket	2 Paket
		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	2 Paket	2 Paket
		Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	2 Paket	2 Paket
		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah Laporan Fasilitas	2 Laporan	2 Laporan

		Kunjungan Tamu (Laporan)		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2 Laporan	2 Laporan
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12 Laporan	12 Laporan
2	Peningkatan Kualitas Akses Pelayanan	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)	12 Laporan	12 Laporan
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12 Laporan	12 Laporan
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	31 Unit	31 Unit

		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	1 Unit	1 Unit
		Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1 Unit	1 Unit
		Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1 Unit	1 Unit
		Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	2 Unit	2 Unit
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen

		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	50 Dokumen	50 Dokumen
		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	50 Dokumen	50 Dokumen
		Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	50 Dokumen	50 Dokumen
		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	50 Dokumen	50 Dokumen
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	2 Dokumen	2 Dokumen

		penjabaran Perubahan APBD		
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah pemerintah kab/kota	50 Orang	50 Orang
		Jumlah dokumen hasil koordinasi	12 Dokumen	12 Dokumen

		dan pengelolaan kas daerah		
		Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penertiban anggaran kas dan SPD	50 Dokumen	50 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil penatausahaan pembiayaan daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan dana transfer lainnya	19 Dokumen	19 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non	2 Dokumen	2 Dokumen

		tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank		
		Jumlah lporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetorann	3 Laporan	3 Laporan

		Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
		Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimlisasi kas	5 Dokumen	5 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	2 Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas	2 Dokumen	2 Dokumen

		serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan		
		Jumlah orang yang mengikuti prmbinaan pentausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	50 Orang	50 Orang
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	3 Laporan	3 Laporan
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	4 Dokumen
		Jumlah Laporan Pertanggungjawab	4 Laporan	4 Laporan

		an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4 Laporan	4 Laporan
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap	2 Dokumen	2 Dokumen

		LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran	1 Laporan	1 Laporan

		Bantuan Keuangan		
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 1	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Rencana Kebutuhan	1 Dokumen	1 Dokumen

		Barang Milik Daerah		
		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD2	2 Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan

		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	2 Laporan
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	4 Orang	4 Orang

N O	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupanten / Kota	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.999.590	15.000.030
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	14.999.900	19.999.780
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.999.760	15.974.250
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.999.835	12.005.525
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.888.948.94 6	21.749.193.5 92

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	55.433.000	62.633.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	44.999.900	41.970.250
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.998.780	10.000.500
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	14.999.670	7.500.825
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		

		Peyediaan Komponnen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	4.992.548	4.992.548
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.999.900	44.999.375
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	811.250	92.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.539.175	66.997.750
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74.999.720	69.999.605
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	4.500.000	2.475.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000	60.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.835.000	129.070.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		

		Pemerintah Daerah		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.645.000	4.645.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	159.996.000	149.980.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	316.800.000	289.600.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.870.575	159.996.115
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.950.000	14.950.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.994.402	24.977.780

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.200.000	12.450.000
--	--	--	-----------	------------

N O	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupante / Kota	Perencanaan, penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.488.590	29.965.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	14.999.790	12.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.993.820	14.889.770
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.996.875	12.003.700
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.180.831.240	3.119.810.459
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	44.999.660	44.999.660
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	15.000.000	15.000.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.999.900	4.999.900
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.999.940	9.999.940
		Administrasi Kepegawaian		

		Perangkat Daerah		
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.500.000	7.500.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
		Peyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	2.980.501	2.980.501
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.999.750	20.004.950
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.998.250	7.500.250
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	12.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.980	25.002.300
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	900.000	900.000

		Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	20.000.000
		Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.980.000	88.340.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.000.000	29.460.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.800.000	9.600.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	17.668.841	14.043.305

		Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.950.000	2.950.000
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.994.800	25.986.490
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.950.000	4.950.000
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	310.431.185	319.983.645
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	299.999.840	273.024.460

		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	35.000.000	29.999.940
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	34.999.745	29.999.695
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	34.999.680	29.999.890
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	35.000.000	29.999.700
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.549.999.590	1.557.202.050
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	558.149.888	689.494.888

		Perubahan APBD		
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	149.999.750	195.054.750
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	29.999.660	94.999.800
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	29.999.700	94.999.940
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	29.999.700	15.000.750
		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	24.999.600	14.999.925
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	200.000.000	189.813.000
		Penyiapan, Pelaksanaan	100.000.000	90.000.000

		Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	35.000.000	30.000.000
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	35.000.000	30.000.000
		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	35.000.000	30.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran	89.999.935	133.367.575

		Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	30.000.000	25.000.000
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	125.000.000	100.000.500

		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	30.000.000	25.000.000
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	35.000.000	62.606.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	39.883.750	30.083.750
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,	74.997.500	136.572.000

		Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	79.999.310	69.994.750
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	99.999.500	78.973.000
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kot a dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	579.999.900	489.249.900

		Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	29.999.790	107.294.790
		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	124.964.750	135.424.750
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	34.996.000	29.996.320
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan	34.999.720	29.969.500

		Keuangan Pemerintah Daerah		
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	24.987.400	30.976.600
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	24.935.250	24.935.250
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kot a	1.578.000.000	1.633.307.885
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah	1.190.240.000	651.800.000

		Daerah Bidang Keuangan Daerah		
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah		
		Penyusunan Standar Harga	74.999.850	64.999.730
		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	74.999.780	64.992.720
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	74.999.700	74.799.520
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	29.999.710	24.999.820
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	34.999.530	29.999.990
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	54.999.735	65.319.735

		Pengamanan Barang Milik Daerah	182.699.720	224.187.540
TOTAL			11.892.811.105,-	11.624.810.283,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran Pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja mencakup 2 (dua) aspek, yaitu :

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) SKPD yang merupakan tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tolak ukur kinerja kebijakan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur haruslah didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Dan Aset Daerah dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Adapun untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kinerja dimaksud, digunakan instrument standart pengukuran ordinal dengan skala pengukuran kinerja yaitu :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL REALISASI KINERJA	NILAI KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91-100 %	Sangat Tinggi
2	76-90 %	Tinggi
3	66-75 %	Sedang
4	51-65%	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Standar pengukuran kinerja tersebut digunakan sebagai dasar dalam menganalisa terhadap penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Flores Timur

Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah wujud pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Indikator sasaran BKAD Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
berdasarkan indikator sasaran

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah	18 Dokumen	17 Dokumen	92,35

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian target kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dikategorikan Sangat Tinggi karena mencapai 92,35%.

Bila dilihat berdasarkan pencapaian sasaran-sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur maka Pengukuran Kinerja Kabupaten Flores Timur tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN (SUB KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET %
	Terwujudnya Ketersediaan Administrasi Perkantoran yang memadai dan berkualitas	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap. Cap. Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap. Cap. Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10 Laporan	10 Laporan	100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	3 Laporan	3 Laporan	100

			perangkat Daerah (Laporan)			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	490 Orang/bulan	35 Orang/bulan	100
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 Laporan	36 Laporan	100
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	100
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	31 Unit	100
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	50 Dokumen	100
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	50 Dokumen	100
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	50 Dokumen	100
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	50 Dokumen	100
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	2 Dokumen	2 Dokumen	100

		Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penjabaran Perubahan APBD			
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Dokumen	50 Dokumen	100
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	50 Dokumen	50 Dokumen	100
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	19 Dokumen	19 Dokumen	100
		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi	3 Laporan	3 Laporan	100

			Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5 Dokumen	5 Dokumen	100
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	100
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4 Laporan	4 Laporan	100
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4 Laporan	4 Laporan	100

		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	50
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	100
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100

		Barang Milik Daerah				
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN (SUB KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		TAHUN 2023			TARGET AKHIR RENSTRA 2026
				REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	
1	Terwujudnya Ketersediaan Administrasi Perkantoran yang Memadai dan Berkualitas	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</i>	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	9 Laporan	9 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100	10 Laporan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)</i>			3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14 Bulan	14 Bulan	35 Orang/12 Bulan	35 Orang/12 Bulan	100	35 Orang / 14 Bulan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12 Bulan	12 Bulan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)			36 Laporan	36 Laporan	100	36 Laporan
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			2 Laporan	2 Laporan	100	1 Dokumen
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Laporan

		<i>Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai(Dokumen)</i>			5 Orang	5 Orang	100	2 Dokumen
		<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)</i>			5 Orang	5 Orang	100	5 Orang
		<i>Peyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)</i>	8 Paket	8 Paket	5 Paket	5 Paket	100	5 Paket
		<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)</i>			2 Paket	2 Paket	100	2 Paket
		<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga (Paket)</i>			2 Paket	2 Paket	100	2 Paket
		<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)</i>	56 Jenis	56 Jenis	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket
		<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)</i>	70000/100 Lembar/Buku	70000/100 Lembar/Buku	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dokumen)	5 Jenis/Bulan	5 Jenis/Bulan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	700 Dos	700 Dos	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	70 Kali	70 Kali	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	150 Lembar	150 Lembar	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	40 Orang	40 Orang	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	34 Unit	34 Unit	31 Unit	31 Unit	100	31 Unit

		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)						
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	7 Unit	7 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	5 Unit	5 Unit	1 Unit	1 Unit	100	2 Unit
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (dok)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (dok)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen

		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (dok)	2 Dokumen					50 Dokumen
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (dok)	2 Dokumen	2 Dokumen	50 Dokumen			50 Dokumen
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (dok)		2 Dokumen	50 Dokumen			50Dokumen
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (dok)	2 Dokumen	2 Dokumen	50 Dokumen			50 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (dok)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (dok)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (dok)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen

	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (dok)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (dok)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (dok)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)			50 Orang	50 Orang	100	50 Orang
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dok)	2 Kali	2 Kali	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (dok)	2 Kali	2 Kali	50 Dokumen	50 Dokumen	100	50 Dokumen
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (dok)	2 Kali	2 Kali	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen

	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (dok)	2 Kali	2 Kali	19 Dokumen	19 Dokumen	100	19 Dokumen
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (dok)			2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan	2 Kali	2 Kali	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan

			Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan emungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (laporan)						
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (dok)	2 Kali	2 Kali	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (dok)	2 Kali	2 Kali	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen

	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (dok)	2 Kali	2 Kali	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)			50 Orang	50 Orang	100	50 Orang
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (laporan)	12 Bulan	12 Bulan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (dok)	12 Bulan	12 Bulan	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan

		Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	dan Semesteran (laporan)						
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (laporan)	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (dok)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen
		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dok)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen
		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dok)	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen

		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (dok)	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (dok)	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (laporan)	12 Bulan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (laporan)	12 Bulan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (laporan)	12 Bulan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan
		'Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (dok)	12 Bulan	12 Bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen

	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (dok)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (dok)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (dok)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (dok)			1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (laporan)	6 Dokumen	6 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (laporan)	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (laporan)	40 Unit/25 Bidang	38 Unit/10 Bidang	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (laporan)			2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan

	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (laporan)			2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (laporan)	40 Unit	45 Unit	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (laporan)	6 Dokumen	6 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	6 Dokumen	6 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)	6 Dokumen	6 Dokumen	4 Orang	4 Orang	100	4 Orang

a. Sasaran 1 : Terwujudnya Ketersediaan Administrasi

Perkantoran yang memadai dan berkualitas

Sasaran ini dicapai melalui program rutin SKPD, yaitu

:

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

**1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah**

Target		Realisasi		Capaian (%)
Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	100%

**2) Sub kegiatan Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen RKA – SKPD**

Target		Realisasi		Capaian (%)
Tersedianya Dokumen RKA – SKPD	4 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA – SKPD	4 Dokumen	100%

3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Target		Realisasi		Capaian (%)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	100%

4) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target		Realisasi		Capaian (%)
Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	100%

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Target		Realisasi		Capaian (%)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/Bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/Bulan	100%

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	100%

3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	36 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	36 Laporan	100%

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	100%

1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	100%

1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan	5 Paket	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan	5 Paket	100%

2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	100%

3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	100%

4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	2 2Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	2 Paket	100%

5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	100%

6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 2Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	100%

7) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	100%

8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Dokumen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Dokumen	100%

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	100%

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air, dan Listrik

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	100%

3) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	100%

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	31 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	31 Unit	100%

- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Peralatan dan Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	100%

3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Gedung kantor yang dipelihara /direhab	1 1Unit	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara /direhab	1 Unit	100%

4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / rehabilitasi	1Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / rehabilitasi	1 Unit	100%

5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Target		Realisasi		Capaian (%)
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara / rehabilitasi	2 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara / rehabilitasi	2 Unit	100%

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 ini merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja serta realisasi penggunaan dana tahun 2023 dari pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur telah berusaha memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat ataupun aparatur melalui program dan kegiatannya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian target kinerja masing-masing indikator kinerja sasarnya.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini akan dijadikan sebagai bahan referensi untuk peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur kedepannya. Namun secara keseluruhannya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur telah berupaya melaksanakan program dan kegiatannya dengan baik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Komitmen dan dedikasi yang kuat mulai dari unsur pimpinan sampai level staf dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan telah dibuktikan dengan pelaksanaan setiap kegiatan secara maksimal dalam upaya mencapai target yang telah direncanakan.

Sesuai hasil evaluasi dan analisa kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagaimana pada bab terdahulu, maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi secara menyeluruh, maupun yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang masuk kelompok Indikator Kinerja besaran capaiannya rata-rata diatas 90 % dan sesuai dengan pedoman instrument standart pengukuran yang ditentukan, maka kinerja ini dapat dikatakan masuk kategori Sangat Berhasil.
2. Capaian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 secara menyeluruh pencapaian tingkat realisasi penyerapan anggaran belanja mencapai 92,35% Kondisi kinerja keuangan tersebut, sesuai pedoman instrument standart pengukuran yang ditentukan, maka capaian kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 juga dapat dikatakan masuk kategori Berhasil.

4.2 SARAN

Dari uraian capaian kinerja Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur serta perbandingan dengan capaian kinerja Tahun 2022 dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatannya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan telah berupaya dengan baik. Hambatan dan kendala yang ditemui berdasarkan evaluasi yang dilakukan akan dijadikan sebagai faktor utama dalam perbaikan kinerja kedepan

khususnya yang bersifat internal. Namun untuk faktor penghambat yang bersifat eksternal akan dilakukan upaya lebih lanjut dalam bentuk koordinasi yang bersifat intens dan perlu ditempuh langkah-langkah konkrit sebagai upaya perubahan menuju perbaikan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dan disampaikan setiap akhir tahun anggaran, sebagai bentuk pertanggungjawaban akan keberhasilan maupun kegagalan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Melalui laporan kinerja instansi pemerintah dapat pula diharapkan terwujudnya peningkatan akuntabilitas serta kinerja instansi pemerintah, dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi Kabupaten Flores Timur. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) unit Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 ini dibuat, sekiranya bermanfaat untuk semua pihak, terima kasih.

Larantuka, Januari 2024

Mengetahui
Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Flores Timur,


† **Verdinandus F. A Bolen, SE**
Pembina Tk.I
NIP. 197107132000121006